

PERUBAHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 1970-2006 (*The Environmental Change in Sidoarjo Regency, 1970-2006*)

Daud Wasista, Nawiyanto
Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : daudzone@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh proses industri di Kabupaten Sidoarjo. Melalui pendekatan lingkungan, tulisan ini mencoba menganalisis pertentangan antara kepentingan industri dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah sehingga menghasilkan tulisan yang deskriptif analitis. Sumber diperoleh melalui penelitian dokumen, artikel, surat kabar serta wawancara dengan pelaku sejarah. Sejak awal 1970-an pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo khususnya di sektor industri melaju dengan sangat cepat. Dengan munculnya industri di Kabupaten Sidoarjo terjadi proses alih fungsi lahan. Ribuan hektar lahan pertanian dan pertambakan milik masyarakat digusur dan diganti menjadi lahan industri. Setelah menjamurnya industri di Kabupaten Sidoarjo, muncul permasalahan baru yaitu adanya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana industri modern masuk dan berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Disebutkan pula proses konversi lahan, dari semula lahan pertanian dan pertambakan menjadi lahan industri. Selain itu dipaparkan beberapa kasus pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Sidoarjo beserta dampak dan respons terhadap pencemaran tersebut, serta peran penting Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam upaya menekan laju pencemaran lingkungan akibat proses industri. Gambaran di Kabupaten Sidoarjo tersebut menunjukkan bahwa sulit untuk menjadikan industri dan lingkungan seiring dan sejalan.

Kata Kunci: *Sidoarjo, industri, lingkungan, pencemaran.*

ABSTRACT

This article discusses the environmental change caused by industrial process in Sidoarjo Regency. By environmental approach, this article tries to analyze the contradiction of industrial importance and the environment purity in Sidoarjo Regency. This research uses historical method to produce analytical descriptive writing. Sources derived from documents, articles, newspapers, and historical actors. Since the beginning of 1970s, the economic development especially industrial sector grows faster. There is change function process of land by the arising of industry. Thousands agricultural lands and fish ponds belong to the society are condemned and changed with industrial sector. After the industrial sector mushrooming in Sidoarjo regency, there are new problems arising such as wasted environment caused by industrial waste. Thus, this article explains three problems: how the modern industrial enter and grows in Sidoarjo regency; land conversion process, from agricultural lands and fish ponds become industrial lands; and some problems of wasted environment and the impacts and response to that waste, also the role of the government of Sidoarjo regency in pushing the growth of waste environment because of industrial process. Illustration of Sidoarjo Regency shows industry and environment so difficult to be harmonized.

Key word: *Sidoarjo, industry, environment, wasted area.*

1. Pendahuluan

Industri menempati posisi yang sangat sentral dalam perekonomian masyarakat modern. Sejak lahirnya Revolusi Industri di Inggris

memunculkan perubahan cara kerja yang radikal dari penggunaan tenaga manusia diubah menjadi cara kerja dengan menggunakan tenaga mesin yang bekerja secara mekanis. Bagi negara

berkembang, industri sangat essential untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Pada era Orde Baru di Indonesia, industri merupakan salah satu sektor yang menjadi ujung tombak perekonomian dan pembangunan. Pemerintah mencoba menjaring investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan dikembangkannya sektor industri diharapkan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk dapat kembali stabil dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat.

Roda pembangunan ekonomi Indonesia menggelinding cukup cepat selama sekitar tiga dasawarsa sejak 1970. Sektor industri saja telah tumbuh dengan kecepatan 12% setahun, hampir dua kali lipat laju pertumbuhan ekonomi selama Repelita II yang rata-rata 6,7% setahun. Peranan industri yang begitu besar, tidak kendor dalam dasawarsa 1980-an, bahkan direncanakan untuk dipacu lebih jauh laju lagi, sehingga andil sektor ini diharapkan menjadi 12% dari produk nasional di akhir Pelita III. Semuanya ini (tentu) ada nalarnya, namun konsekuensinya juga tidak dapat diabaikan. Namun di sisi lain, pertumbuhan industri yang begitu pesat juga telah melahap ribuan hektar tanah pertanian yang subur, menguruk sawah dan tambak serta mengusur puluhan kampung penduduk sambil memusnahkan tempat-tempat pemijahan bibit ikan dan udang di pantai. Belum lagi penduduk dan petani yang secara tak langsung tergusur karena kecipratan getah yang bernama polusi industri (Aditjondro,2003:xv).

Kabupaten Sidoarjo memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa ada “masalah” yang serius antara kepentingan industri dengan kelestarian lingkungan. Di satu sisi pembangunan ekonomi industri dapat meningkatkan pendapatan daerah dan di sisi lain pembangunan tersebut menimbulkan dampak lingkungan.

2. Sidoarjo Menuju Industrialisasi

Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pinggiran Kota Surabaya ke arah selatan yang merupakan daerah pertanian yang subur karena terletak di Delta Sungai Berantas. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar 64.108,75 ha (Adika,2004:18). Batas wilayahnya sesuai dengan batas wilayah Sidoarjo yang sekarang yaitu Sebelah Timur (Selat Madura), Barat (Kabupaten Gresik), Utara (Kabupaten Surabaya) dan Selatan

(Kabupaten Pasuruan). Secara topografis Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dataran rendah. Ada dua sungai utama yang melintasi wilayah Sidoarjo, yakni Sungai Mas dan Sungai Porong yang merupakan pecahan Sungai Brantas. Kota Sidoarjo berada di selatan Surabaya, dan secara geografis dan ekonomis kedua kota ini menyatu. Letak Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kota Surabaya merupakan pintu gerbang ke Kota Surabaya yang dihubungkan dengan jalan raya kelas I, merupakan peluang yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah. Selain identik dengan kegiatan pertambakan, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki wilayah persawahan yang produktif.

Sebelum masuknya industri modern, perekonomian Kabupaten Sidoarjo ditopang oleh sektor pertanian, industri dan pertambakan. Sektor pertanian merupakan salah satu andalan Kabupaten Sidoarjo dengan padi sebagai komoditas utamanya. Bahkan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu lumbung padi Jawa Timur (Dick,1997:195). Rekam jejak industrialisasi di Kabupaten Sidoarjo sudah berakar sejak era pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu Sidoarjo sudah dihitung sebagai salah satu kekuatan ekonomi. Salah satu tolok ukur yang bisa menjadi indikator yaitu banyaknya pabrik gula di Sidoarjo. Pemerintah Kolonial Belanda membangun pabrik gula di Sidoarjo dikarenakan sistem pengairan di Sidoarjo yang baik dan melimpah. Sejumlah pabrik-pabrik gula pun didirikan. Sejarah mencatat ada sekitar 9 pabrik pabrik gula yang pernah berdiri di Sidoarjo, mulai dari Ketegan (Taman), Sruni (Gedangan), Buduran, Candi, Tulangan, Krembung, Wonoayu, Krian hingga Watu Tulis (Prambon).

Kegiatan ekonomi Kabupaten Sidoarjo juga sangat identik dengan pertambakan. Pada masa kolonial, Kabupaten Sidoarjo mempunyai lahan tambak yang luasnya mencapai 12.095 ha (tahun 1930) (Yasuo,2006:14). Andalan produksi budidaya tambak kabupaten Sidoarjo adalah komoditas bandeng dan udang terutama udang windu dan vaname. Bandeng dan udang kemudian dijadikan lambang Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan laporan Dinas Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2003, pusat tambak di Jawa Timur terletak di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo dengan persentase luas tambak masing masing 38,44% dan 32,17% dari total luas tambak di Jawa Timur

yang tercatat seluas 53.423 ha. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tambak di Sidoarjo merupakan yang terbesar kedua setelah Kabupaten Gresik (Abidin,2010:2).

Industrialisasi yang berlangsung di Sidoarjo difasilitasi dengan perbaikan yang terjadi di bidang transportasi yang mengintegrasikannya secara semakin intensif dengan Surabaya. Sarana transportasi menghubungkan Kabupaten Sidoarjo dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur sudah ada sejak masa kolonial Belanda, yakni jaringan rel kereta api. Di Sidoarjo saat ini terdapat dua lintasan kereta api yang masih berfungsi, di sebelah timur kota dan barat kota. Lintasan di timur ini, selain menghubungkan Sidoarjo dengan kota-kota di belahan selatan Jawa Timur, juga menghubungkan kota-kota di Jawa timur bagian timur. Sementara lintasan Barat menghubungkan Sidoarjo dengan Jawa Timur bagian tengah dan sampai ke Jawa Barat, jika akan ke Jakarta, lintasan ini kerap di sebut “jalur Selatan”. Selain jalur kereta, di wilayah Sidoarjo juga terdapat stasiun stasiun yang tersebar di sepanjang kedua jalur itu. Selain dilintasi jaringan kereta api dan sejumlah stasiun, Kabupaten Sidoarjo juga difasilitasi dengan Bandar Juanda dan Terminal Bus Purabaya. Kedua prasarana angkutan yang penting ini berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3. Perkembangan Industri Sidoarjo

Dua dekade terakhir (1980-1990 dan 1990-2000) mulai terjadi proses restrukturisasi sosial-ekonomi di Surabaya, begitu pula daerah di luar batas administrasi Surabaya. Pembangunan mulai meluas dari kota Surabaya menuju wilayah Sidoarjo dan Gresik (Adika,2004:17). Surabaya memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis-administratif, Surabaya sangat bergantung pada Sidoarjo karena jaringan transportasi (jalan raya dan kereta api) dari arah selatan dan timur harus melewati Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah konsentrasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Propinsi Jawa Timur. selama kurun waktu antara tahun 1969 hingga tahun 1994 Kabupaten Sidoarjo menempati urutan kedua di bawah Surabaya sebagai daerah konsentrasi proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang sangat memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan

yang diperlukan bagi suatu investasi. Kabupaten Sidoarjo banyak diminati oleh para investor dan pengembang untuk menanamkan modalnya di wilayah ini karena lokasinya yang cukup strategis.

Adapun jumlah PMA dan PMDN di Kabupaten Sidoarjo tahun 1978-1990 seperti pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.1: Jumlah Industri berdasarkan PMA dan PMDN Kabupaten Sidoarjo Tahun 1978-1990

No	Tahun	PMA	PMDN
1	1978	14	37
2	1979	14	37
3	1980	15	39
4	1981	15	39
5	1982	15	44
6	1983	13	49
7	1984	13	52
8	1985	11	48
9	1986	12	87
10	1987	13	94
11	1988	14	99
12	1989	14	112
13	1990	14	128

Sumber: Diadaptasi dari BPS Kab. Sidoarjo, *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990.*

Selama kurun waktu 1978-1990 jumlah industri yang termasuk dalam PMDN di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Dari 37 industri pada tahun 1978 meningkat hingga 128 industri pada tahun 1990. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah industri yang tergolong dalam PMA. Selama kurun waktu 1978-1990 jumlah industri PMA cenderung tidak mengalami peningkatan secara signifikan seperti tampak pada Tabel 3.1.

Dari penjelasan Tabel 3.1, bukan berarti Kabupaten Sidoarjo tidak lagi diminati oleh investor asing yang ingin menanamkan modalnya, akan tetapi pasca kerusuhan Malari (1974), pemerintah menetapkan sebuah aturan tentang tidak boleh adanya pemilikan investasi asing baru sebesar 100%. Dengan kata lain, para investor asing mau tidak mau harus bekerjasama dengan pemilik modal dalam negeri. Ada semacam keharusan kerjasama (*joint venture*) antara pemilik modal dalam negeri dengan pemilik modal asing. Banyak data investasi asing juga

termasuk didalam sejumlah modal dalam negeri. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan dalam negeri telah meminjam dana dari luar negeri secara ekstensif (Hall Hill,1990:69). Alasan utamanya ialah masalah politik dalam negeri. Pemerintah ingin menunjukkan kepekaan terhadap sentimen nasionalis dengan peraturan tersebut. Hingga pertengahan 1980-an, kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pemodal asing yang masuk ke Indonesia (Hall Hill,1990:231). Hal tersebut berdampak pula pada Kabupaten Sidoarjo.

Pertumbuhan perusahaan/industri yang sangat pesat, menyebabkan hampir semua jenis industri ada di Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil Survei Industri tahun 1982 yang dikumpulkan oleh Kantor Statistik Kabupaten Sidoarjo diketahui beberapa jenis industri yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Sidoarjo (BPS,1983:165) meliputi,

- a. Industri makanan, minuman dan tembakau
- b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit
- c. Industri kayu dan barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga
- d. Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan
- e. Industri kimia dan barang kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik
- f. Industri barang mineral bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara
- g. Industri logam dasar
- h. Industri barang dan logam, mesin dan peralatan
- i. Industri pengolahan lain

Hingga tahun 2004, PDRB Kabupaten Sidoarjo terus meningkat hingga sebesar Rp 31.380.528,11 juta (BPS,1994:20). Pesatnya perekonomian Kabupaten Sidoarjo membuktikan bahwa kabupaten yang menjadi penyangga Kota Surabaya ini mampu mengimbangi besarnya laju perekonomian Surabaya. Bahkan, dengan meningkatnya jumlah industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo, kabupaten ini mulai mampu melepaskan predikat sebagai wilayah pengganti industri Surabaya. Sidoarjo mampu menciptakan peluang penanaman investasi bagi para pengembang maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Sidoarjo. Dapat dikatakan bahwa Sidoarjo mulai bertransformasi, tidak hanya dikenal sebagai kota udang tetapi juga kota industri. Memahami potensi yang ada di kabupaten Sidoarjo, dan sebagai bagian Satuan

Wilayah Pembangunan dari Gerbangkertosusila, maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bawah pimpinan Bupati Win Hendrarso (2000-2010) membuat kebijakan untuk mengembangkan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri, agar dapat mendukung pertumbuhan di wilayah Gerbangkertosusila. Beberapa wilayah ditawarkan kepada para investor, seperti Kecamatan Jabon. Rencananya kawasan ini bernama Jabon Industrial Estate Sidoarjo (JIES). Namun kawasan industri di Jabon ini masih sebatas impian, karena program Jabon Industrial Estate Sidoarjo (JIES) ini memang disiapkan untuk jangka panjang, sehingga diprediksikan bakal terwujud sekitar 25 tahun lagi (Surabaya Post, 07 Juni 2001). Tidak hanya Kecamatan Jabon saja yang ditawarkan kepada investor dan pengembang industri, tetapi juga Kecamatan Krian. Sebenarnya di kecamatan ini sudah banyak berdiri berbagai macam industri, akan tetapi belum ada yang mengelola. Lokasi yang dipersiapkan Pemkab Sidoarjo untuk para investor dan pengembang ialah di sepanjang *by pass* Krian.

Gagasan yang cukup mengejutkan datang dari Bupati Win Hendrarso yang mencanangkan adanya penggabungan dari ketiga kawasan industri dengan nama Siborian (Sidoarjo, Jabon, Krian). Sesuai dengan namanya, kawasan industri Siborian merupakan gabungan dari tiga kawasan industri (KI), yakni KI Sidoarjo (disekitar Jalan Lingkar Timur), KI Jabon dan KI Krian (sepanjang *by pass* Krian). Ketiga kawasan industri ini rencananya akan dipersiapkan bagi para investor dan pengembang yang ingin menjadi pengelola dari ketiga kawasan industri tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, belum ada satupun proyek impian dari Bupati Win Hendrarso yang terlaksana. Mengapa demikian? Terhambatnya realisasi pengembangan kawasan industri Sidoarjo, Jabon dan Krian (Siborian) disebabkan kurang proaktifnya instansi di lingkungan Pemkab Sidoarjo dalam melakukan langkah terobosan dalam upaya menjaring investor (Surabaya Post, 08 Juni 2001).

Salah satu faktor penghambat proyek Kawasan Industri Siborian ialah adanya bencana lumpur Lapindo. Bencana ini dianggap sebagai penghambat akses masuknya transportasi dari kabupaten lain di Jawa Timur yang akan masuk ke ibukota propinsi melalui Kabupaten Sidoarjo. Setelah terjadinya bencana lumpur Lapindo, Pemkab Sidoarjo terpaksa harus menata ulang

semua perencanaan, termasuk menentukan tata ruang.

4. Konversi Lahan

Pemerintah Daerah Sidoarjo seakan-akan berada di persimpangan jalan. Pada satu sisi wilayah ini harus menerima luberan investor, pada sisi lain Sidoarjo juga ingin mempertahankan sektor pertanian yang masih diandalkan sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mau melewatkan peluang daerahnya diminati para investor. Fenomena ini dapat dilihat dari pertumbuhan industri yang terus melebarkan sayapnya di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 1970-an hingga 1990-an.

Muncul masalah baru dengan masuknya industri di kabupaten ini, yakni Pemerintah Sidoarjo harus menyiapkan lahan untuk lokasi pendirian industri bagi para investor yang bersedia menanamkan modalnya. Berdasarkan data yang masuk ke Kantor Agraria Kabupaten Sidoarjo tahun 1983/1984, dilaporkan sebanyak 106,17 ha luas tanah pertanian yang akan dibebaskan untuk kegiatan industri (BPS,1984:125). Hasil laporan kantor agraria tersebut menggambarkan terjadinya konversi lahan. Lahan pertanian mulai tergusur akibat semakin menjamurnya industri di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, pada tahun 1987 lahan pertanian di Sidoarjo yang hilang karena terdesak oleh pengembangan industri seluas 700 ha (Surabaya Post, 13 April 1987). Pada tahun 1996, harian Surabaya Post melaporkan adanya penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo sebesar 500 ha. Lahan pertanian tersebut diincar oleh sebagian besar investor untuk bangunan pabrik (Surabaya Post, 05 Januari 1996). Selain itu dikabarkan sekitar 400 ha lahan pertanian di perbatasan Mojokerto, yang tersebar di Desa Balongbendo, Kemansen dan Jimbaran, dirancang untuk industri (Surabaya Post, 18 Januari 1996).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo rencananya akan membebaskan lahan seluas 2000 hektare yang meliputi 6 desa di Kecamatan Jabon sebagai lokasi Jabon Industrial Estate Sidoarjo (JIES). Bupati Win Hendrarso menjelaskan bahwa penunjukan Kecamatan Jabon sebagai lokasi yang ditawarkan untuk industri bukan didasarkan karena lahan di kecamatan itu sudah tidak subur

lagi untuk dijadikan lahan pertanian, tetapi semata-mata disebabkan tidak optimalnya jumlah panen yang dihasilkan para petani akibat tidak sempurnanya sistem pengairan sawah yang diterapkan di sana (Surabaya Post, 01 Maret 2001). Alasan itulah yang dijadikan pegangan utama Bupati Win Hendrarso untuk menyulap wilayah tersebut dari lahan pertanian menjadi kawasan industri. Untuk merealisasi rencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merencanakan akan membebaskan lahan seluas 2 ribu hektare yang meliputi 6 desa di Kecamatan Jabon, diantaranya Desa Trompo Asri, Desa Jemirahan, Desa Balong Tani, Desa Kupang, Desa Sembung, dan Desa Kedung Rejo.

5. Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya

Kemajuan yang sangat pesat di sektor industri tersebut tidak serta-merta menjadikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sejahtera. Ada hal lain yang masih meresahkan masyarakat selain masalah ekonomi, yakni permasalahan lingkungan. Sektor industri yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah ternyata harus mengorbankan lingkungan. Aspek sumber daya alam yang tersedia di bumi jumlahnya terbatas, sehingga apabila sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dan dieksploitasi terus menerus akan merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Akibat lain yang ditimbulkan adalah degradasi lingkungan berupa semakin meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Para industriawan seringkali mengesampingkan dampak lingkungan dari proses industrialisasi yang mereka lakukan. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan paham antroposentris yang memandang bahwa alam dan seisinya merupakan alat untuk menggapai kesejahteraan manusia. Paham ini dinilai sangat instrumentalis dan egoistis (Keraf,2006:34). Para industriawan dianggap telah membabi buta mengeksploitasi alam dan beralih itu semua untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya industri dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah, peningkatan tersebut sering diikuti dengan dampak lingkungan yang buruk.

Beberapa bentuk pencemaran industri yang sempat muncul dan diberitakan oleh media salah satunya ialah pencemaran udara. Harian Surabaya Post pernah mengabarkan tentang pencemaran yang dilakukan oleh sebuah

perusahaan peleburan emas. Warga lingkungan Jetis, Kelurahan Lemahputra memprotes limbah gas yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Warga mengeluhkan bau dan asap yang dikeluarkan cerobong dan saluran pembuangan perusahaan itu pada malam hari. Akibat pencemaran udara tersebut, dilaporkan sudah ada 8 orang warga menderita sesak nafas dan terkena gangguan paru-paru (Surabaya Post, 24 Februari 1998). Kasus lainnya menimpa warga perumahan Delta Sari Permai Kelurahan Kureksari. Warga bersama dengan LSM setempat mendesak PT Panggung Elektronik (PT PE) untuk memindahkan cerobong limbahnya karena cukup meresahkan warga sekitar. Cerobong tersebut setiap harinya membuang limbah berupa debu yang dihasilkan dari serbuk sisa penggergajian kayu untuk rak televisi dan salon yang dihasilkan perusahaan itu. Akibatnya, beberapa warga khususnya anak-anak dan balita terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) (Surabaya Post, 15 November 2000).

Ada juga kasus tentang adanya limbah asap, abu dan debu dari pabrik gula (PG) Candi mengotori lingkungan di sekitar lokasi pabrik hingga mencapai radius 2 kilometer. Debu dan abu berwarna putih tidak hanya mengotori atap rumah warga tetapi juga menimbulkan noda-noda hitam di pakaian yang dijemur oleh warga. Ada juga keluhan dari warga sekitar yang mengatakan bahwa debu-debu tersebut sampai masuk ke dalam rumah dan mengotori makanan yang diletakkan di atas meja makan. Sedangkan asapnya menyebabkan sesak napas dan rawan menimbulkan infeksi saluran pernapasan (Surabaya Post, 19 Mei 2001).

Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kasus pencemaran air. Harian Surabaya Post memberitakan tentang pencemaran air yang terjadi di Kecamatan Krian tahun 1996. Limbah cair dari pabrik yang berada di Sidorejo (jalur Taman-Krian) telah menggenangi saluran irigasi sebuah sekolah, yakni SMPN 3 Krian. Gedung SMPN 3 Krian memang berdampingan dengan sejumlah pabrik di sepanjang jalur Taman-Krian. Hal ini jelas mengganggu proses belajar mengajar SMPN 3 Krian karena muncul bau yang tidak sedap. Sering para siswa dan pengajar mengeluh pusing dan tak tahan dengan bau tersebut (Surabaya Post, 08 Agustus 1996). Diberitakan pula oleh media, terkait pencemaran yang dilakukan oleh PT Surya Indo Algas (PT SIA)

sebuah perusahaan produsen bahan baku agar-agar. Perusahaan yang berada di Kecamatan Wonoayu ini dicurigai mencemari air sungai dan sumur warga yang sehari-hari masih dimanfaatkan untuk MCK (mandi, cuci, kakus). Akibatnya, air sungai di sekitar lokasi pabrik berbau anyir dan menyebabkan gatal-gatal. Kondisi serupa juga terjadi di hampir semua sumur milik warga hingga membuat sumber air itu bahkan tidak layak lagi untuk mandi dan mencuci pakaian (Surabaya Post, 14 Desember 2000).

Air tanah di beberapa desa di Waru serta air Sungai Butung Sidoarjo diindikasikan tercemar limbah logam berat hasil buangan bengkel dan industri kecil pembuatan berbagai peralatan berbahan baku aluminium dan chrom. Akibatnya, air sumur yang biasa dipakai warga setempat untuk berbagai keperluan sehari-hari itu tidak bisa lagi dimanfaatkan karena menyebabkan gatal-gatal di kulit (Surabaya Post, 26 Januari 2002). Adanya liputan tentang pencemaran yang dilakukan oleh Pabrik Gula (PG) Ngadirejo di Kediri. Limbah pengolahannya yang berupa tetes tebu diduga mencemari Sungai Brantas. Tangki tetes tebu sisa pengolahan meluap karena sudah tidak mampu menampung volume tetes tebu yang dihasilkan. Dampak pencemaran akibat meluapnya tangki tetes tebu milik Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kabupaten Kediri, semakin meluas dan kian parah hingga merusak baku air Sungai Brantas. Dampaknya juga dirasakan hingga ke Sungai Porong yang merupakan sungai terbesar di Sidoarjo. Sungai Porong yang merupakan pecahan dari Sungai Brantas mengalami tingkat pencemaran yang cukup parah. Tidak hanya itu, kerusakan baku air sungai Sungai Porong juga meresahkan kalangan petani tambak di Sidoarjo, khususnya yang berlokasi di desa Tambak Oso dan Segoro Tambak. Rata-rata petani setempat memanfaatkan air sungai sebagai satu-satunya bahan pensuplai air di petak tambaknya. Jika air itu masuk ke areal tambak, dipastikan semua komoditas perikanan yang ada di sana akan langsung mati dan tidak dapat dikonsumsi (Surabaya Post, 11 Agustus 2001).

Masih ada beberapa isu pencemaran di Kabupaten Sidoarjo yang tak luput dari pemberitaan media, seperti Pencemaran Sungai oleh PT BA di Kecamatan Krian (1996); Bau tak sedap ditimbulkan oleh pabrik pengolah tulang di Desa Kletek, Kecamatan Taman (1998); Pabrik pengolahan kulit PT Rajawali di Desa

Tanjungsari, Kecamatan Taman yang membuang limbah cairnya ke Kali Buntung (1998); Pabrik kerupuk di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin yang mengeluarkan limbah udara yang berasal dari cerobong asap yang diameternya kurang besar dan kurang tinggi (1998); dan 4 pabrik lainnya di Kecamatan Buduran, yaitu PT Ujung Timur, PT Samsung, PT Paboxin dan PT Multi Prawns yang membuang limbah cair ke aliran sungai sekitar pabrik (Surabaya Post, 16 April 1998).

Beberapa kasus pencemaran limbah B3 yang ada di Kabupaten Sidoarjo, seperti pencemaran limbah B3 oleh PT Maspion Unit I pada tahun 1998. Kasus ini merupakan salah satu pencemaran lingkungan di Kabupaten Sidoarjo yang berupa kasus yang cukup berat. Gudang dan areal pembuangan limbah PT Maspion disegel Bapedal sejak 28 Desember 1998. Diduga PT Maspion Unit I membuang endapan limbah padat yang telah diolah di lapangan terbuka di belakang pabrik. Seharusnya limbah padat itu dikirim ke Pusat Pengolahan Limbah Indonesia (PPLI) di Cileungsi Bogor untuk ditanam, karena limbah tersebut termasuk limbah bahan beracun berbahaya (B3) (Surabaya Post, 19 Agustus 2000). Dari sampel yang diambil ternyata limbah tersebut merupakan konsentrasi logam-logam berat yang sangat tinggi.

Selain itu, terdapat kasus yang cukup berat dan mencoreng nama baik Sidoarjo, yaitu munculnya semburan lumpur panas PT Lapindo. Bencana semburan lumpur panas ini, menyebabkan banyak masyarakat di Sidoarjo menjadi korban. Potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pelepasan lumpur ini ke kali Porong dapat meluas ke kawasan yang melampaui batas wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mengingat besarnya dampak semburan lumpur panas tersebut terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan di Jawa Timur pada umumnya, Pemerintah menaruh perhatian yang besar dalam penanganan dampak semburan lumpur panas ini (Herawati, 2007:2). Tidak salah apabila kasus pencemaran ini disebut sebagai bencana nasional, karena mengganggu roda perekonomian nasional secara umum.

6. Respons Masyarakat dan Pemerintah

Sejak periode 1980-an, banyak sekali pengaduan dari masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik/industri terkait dengan limbah. Agus, staff

bagian Pengawasan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo membenarkan hal tersebut. Menurutnya bentuk pengaduan warga bermacam-macam, misalnya ada yang protes bau, suara bising, asap, debu, limbah cair berupa oli dari pabrik, air sungai berwarna, dan lain-lain. Selama ini yang terjadi di Sidoarjo hanya sebatas isu belum ke tahap kasus yang berat. Ditegaskan pula bahwa pihak BLH akan melakukan pengecekan ke pabrik-pabrik tersebut sebelum mengambil tindakan.

Berbagai macam respons masyarakat Sidoarjo terkait adanya dampak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri. Salah satunya unjuk rasa sekitar 50 warga Desa Tambak Sawah (30 Oktober 2000) terhadap pabrik sabun dan minyak goreng PT Mega Surya Mas (MSM). Hal ini diduga bau tak sedap yang dihembuskan pabrik tersebut. Warga sudah cukup lama merasakan polusi udara yang “disumbang” oleh pabrik tersebut. “Ketenangan” warga diusik saat hujan tiba. Bau yang diduga berasal dari limbah sabun pabrik tersebut kian menyengat (Surabaya Post, 01 November 2000).

Respons yang menarik ditunjukkan oleh warga Kecamatan Jabon. Walaupun sebagian besar lahan di Kecamatan Jabon akan dijadikan kawasan industri, masyarakat setempat dihantui rasa khawatir. Meskipun belum ada kepastian kapan akan dibangun kawasan industri, masyarakat sempat menolak akan didirikannya JIES oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bila nanti investor atau pengembang tidak menangani limbahnya dengan baik. Dikhawatirkan limbah yang dihasilkan dari pembangunan JIES akan menyengsarakan petani dan juga petambak di Jabon (Surabaya Post, 01 Maret 2001). Lain lagi dengan warga perumahan Delta Sari Permai. Bersama dengan LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Delta Sari Korban Pencemaran Lingkungan (Formasi KPL) mendesak PT Panggung Elektronik untuk memindahkan cerobong asapnya ke depan pabrik karena debu dan asap yang dikeluarkan mengarah langsung ke perumahan dan mengakibatkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Warga mengancam akan menuntut PT Panggung Elektronik jika tidak menuruti keinginan mereka (Surabaya Post, 16 April 1998).

Tanggapan yang berbeda dilakukan oleh warga Desa Jimbaran Wetan, Jimbaran Kulon dan Ploso Kecamatan Wonoayu yang menuntut PT

Surya Indo Algas (PT SIA) membayar ganti rugi senilai 5 miliar rupiah karena limbah cairnya telah merusak. Setelah berseteru selama dua bulan, akhirnya PT SIA bersedia memberikan kompensasi ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan produsen bahan baku agar-agar tersebut. Dengan dimoderatori oleh Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, PT SIA diminta untuk segera melakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang selama ini belum beroperasi secara maksimal (Surabaya Post, 02 Februari 2001).

Masih banyaknya isu dan kasus pencemaran membuat pemerintah pusat melalui Bapedal mengambil langkah antisipasi. Sebuah program dengan nama "Program Langit Biru" (PLB) didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15/MENLH/4/1996 tentang penetapan prioritas Daerah Tingkat I Program Langit Biru (Ciptomulyono, 2012:98). Tidak hanya itu, pemerintah telah lama menggulirkan Program Kali Bersih (Prokasih) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. Melalui program ini, perusahaan yang membuang limbah ke sungai diminta secara sukarela menandatangani Surat Pernyataan mengikuti Prokasih (Super Prokasih) yang isinya kesanggupan perusahaan tersebut untuk memenuhi peraturan pengolahan pembuangan limbah (Tim KPJ-3, 1996:114). Menghadapi perusahaan/pabrik yang membuang limbah dengan seenaknya, Pemkab Sidoarjo melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan menindak tegas perusahaan/pabrik tersebut. Tidak main-main, bahkan BLH mengancam akan menutup perusahaan/pabrik tersebut.

Pemkab Sidoarjo (melalui BLH) juga memberikan penilaian terhadap perusahaan industri dengan adanya Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). Salah satu tujuannya ialah untuk lebih jauh lagi meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam kontrol terhadap perusahaan pencemar lingkungan. Kriteria penilaiannya sebagai berikut:

- a. Emas, perusahaan yang mempunyai potensi pencemaran tetapi sudah berhasil menangani limbahnya sampai pada tingkat "pembuangan nol" dan patut

dijadikan contoh bagi perusahaan lainnya.

- b. Hijau, perusahaan yang sudah dapat mengelola limbahnya lebih dari minimum ambang batas berdasarkan peraturan yang ada.
- c. Biru, perusahaan yang sudah cukup memenuhi persyaratan pembuangan limbah.
- d. Merah, perusahaan yang sudah berusaha mengolah limbahnya, tetapi belum berhasil memenuhi persyaratan pembuangan limbah.
- e. Hitam, perusahaan yang tidak mengolah limbahnya dan menimbulkan pencemaran.

Pencemaran limbah dapat dihindari apabila masing-masing pihak dapat menjaga kelestarian alam ini. Sonny Keraf menyebutkan bahwa alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Teori yang sering dikenal dengan paham Biosentrisme ini beranggapan bahwa semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam juga perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak (Keraf, 2006:49). Paul Taylor berpendapat bahwa binatang dan tumbuhan, atau makhluk hidup pada umumnya, bahkan alam, mempunyai hak asasi. Hal itu terutama didasarkan pada penerimaan pandangan biosentris tentang alam, di mana komunitas biotis (ekologis) diterima dan diakui juga sebagai komunitas moral. Dalam komunitas biotis seperti itu, Taylor mengakui bahwa manusia, sebagai pelaku moral, mempunyai kewajiban moral untuk menghargai alam. Kewajiban ini bersifat mengikat sedemikian rupa sehingga sebagai pelaku moral, manusia tidak bisa bertindak sekehendak hatinya dalam berhubungan dengan alam (Keraf, 2006:114).

7. Kesimpulan

Sejak munculnya aturan tentang permodalan pada awal Orde Baru, Kabupaten Sidoarjo merasakan efek yang luar biasa. Kabupaten yang merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Timur mulai menjadikan sektor industri sebagai primadona baru dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Semua itu tidak lepas dari "pengaruh" Surabaya yang

sebelumnya merupakan kota dengan tingkat industrialisasi yang tinggi di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo melihat adanya peluang emas dari perkembangan industri Surabaya yang sangat pesat. Akses jalan dari arah selatan, timur dan barat Jawa Timur yang akan menuju Surabaya mau tidak mau harus melalui Sidoarjo. Tidak hanya itu, Bandara Juanda dan Terminal Bungurasih yang diklaim milik Surabaya, ternyata berada di wilayah Sidoarjo.

Pada awal 1990-an laju perekonomian Kabupaten Sidoarjo tumbuh dengan pesat. Kabupaten Sidoarjo yang semula hanya wilayah pedalaman Surabaya kental dengan karakter agraris pun mendapat julukan baru sebagai “Kota Industri”. Tetapi, kemajuan yang sangat pesat di sektor industri tersebut tidak serta-merta menjadikan masyarakat Kabupaten Sidoarjo sejahtera. Ada hal lain yang masih meresahkan masyarakat kabupaten ini selain masalah ekonomi, yakni permasalahan lingkungan. Kabupaten Sidoarjo menampilkan fakta yang sangat memprihatinkan. Terjadi proses perubahan lingkungan akibat dari kegiatan industri. Ribuan hektar lahan pertanian dan pertambakan di Kabupaten Sidoarjo harus digusur demi pembangunan industri.

Setelah lahan pertanian dan pertambakan beralih fungsi menjadi lahan industri, lingkungan sekitar juga terancam dengan munculnya limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Limbah yang dilepaskan dengan seenaknya ke lingkungan cukup merugikan. Tidak hanya lingkungan yang terkena dampak langsung limbah industri tersebut, masyarakat juga terkena dampaknya. Selama ini masyarakat Sidoarjo “dipaksa” untuk menghirup udara kotor dan berdebu, mendengarkan suara bising mesin-mesin pabrik, menggunakan air sungai yang mengandung zat-zat berbahaya untuk kepentingan sehari-hari, dan sering juga mencium aroma yang tidak sedap setiap saat.

Permasalahan yang perlu diselesaikan adalah membuat kebijakan “jalan tengah”, untuk menegosiasikan kepentingan industri dan lingkungan, yakni industri tetap berlangsung dalam sistem ekonomi yang ada tetapi mutu lingkungan juga tetap dipertahankan.

Pemerintah Daerah Sidoarjo juga mengambil langkah konkrit dengan mengeluarkan kebijakan yang ketat, tidak hanya perijinan pendirian industri tetapi juga mewajibkan industri tersebut untuk tidak membuang “kotoran”

sembarangan. Kenyataannya, beberapa kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih normatif. Adanya persyaratan-persyaratan yang diajukan kepada para industriawan sebelum membangun industri, faktanya hanya sebagai formalitas saja. Selanjutnya, bisnis berjalan seperti biasa. Beberapa industri yang awalnya menyetujui adanya persyaratan tersebut ternyata berulang kali membuang limbah dengan seenaknya. Pemerintah selama ini masih berpihak kepada para industriawan dengan berdalih bahwa sektor industri lebih menjanjikan karena mampu mengangkat pendapatan asli daerah.

Kabupaten Sidoarjo memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwa pembangunan di kabupaten ini belum berwawasan lingkungan. Ada “masalah” yang serius antara kepentingan industri dengan kelestarian lingkungan. Di satu sisi pembangunan ekonomi industri dapat meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan namun di sisi lain pembangunan tersebut menimbulkan dampak lingkungan. Kesimpulannya, antara kepentingan industri dengan kelestarian lingkungan di Kabupaten Sidoarjo belum dapat didamaikan.

8. Daftar Sumber

Sumber Buku :

- Aditjondro, George Junus. *Korban-Korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Atmakusumah, Maskun Iskandar dan Warief Djajanto Basorie (penyunting). *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 1982*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 1983.
- _____. *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka Tahun 1983*. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 1984.
- _____. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1983-*

1992. Sidoarjo: BPS Kabupaten Sidoarjo, 1994.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jawa Timur Dalam Angka 1982*. Surabaya: BPS Provinsi Jatim, 1983.
- _____. *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 1990*. Surabaya: BPS Provinsi Jatim, 1991.
- Ciptomulyono, Udisubakti. *Refleksi Pemikiran Seputar Kebijakan Lingkungan, Industri dan Energi*. ITS Press: Surabaya, 2012.
- Dick, Howard, James J. Fox, dan Jamie Mackie. *Balanced Development: East Java In The New Order*, terjemahan Bambang Sumantri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Ginting, Perdana. *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*. Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Girsang, Laidin. *Indonesia Sejak Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Laita, 1979.
- Hill, Hall. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Ismawan, Indra. *Resiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Kristanto, Philip. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Serambi: Jakarta, 2008.
- Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Tim Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo. *Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname*. Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006.
- Sumber Artikel/Jurnal :**
- Abidin, Zainal. “Analisis Profitabilitas Usaha Budidaya Ikan Bandeng (*Chanos-Chanos*) Di Tambak, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jatim” dalam *Seminar Nasional Tahunan VII Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010.
- Yasuo, Uemura. “The Depression and The People’s Agriculture in Surabaya” dalam *Hiroshima Interdisciplinary Studies in The Humanities Volume 5*. The Graduate School of Letters: Hiroshima University, 2006.
- Sumber Surat Kabar :**
- Surabaya Post*, 13 April 1987.
- Surabaya Post*, 05 Januari 1996.
- Surabaya Post*, 18 Januari 1996.
- Surabaya Post*, 08 Agustus 1996.
- Surabaya Post*, 24 Februari 1998.
- Surabaya Post*, 16 April 1998.
- Surabaya Post*, 19 Agustus 2000.
- Surabaya Post*, 01 November 2000.
- Surabaya Post*, 15 November 2000.
- Surabaya Post*, 14 Desember 2000.
- Surabaya Post*, 02 Februari 2001.
- Surabaya Post*, 01 Maret 2001.
- Surabaya Post*, 19 Mei 2001.
- Surabaya Post*, 07 Juni 2001.
- Surabaya Post*, 08 Juni 2001.
- Surabaya Post*, 11 Agustus 2001.
- Surabaya Post*, 26 Januari 2002.

Sumber Tugas Akhir :

Adika, I Nyoman. “Pengembangan Wilayah Kabupaten Sidoarjo Sebagai Wilayah Pinggiran Kota Metropolitan Surabaya dan Mobilitas Penduduk”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar* pada Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2004.

Herawati, Niniek. “Analisis Risiko Lingkungan Aliran Air Lumpur Lapindo Ke Badan Air (Studi Kasus Sungai Porong Dan Sungai

Aloo-Kabupaten Sidoarjo)”. *Tesis* pada Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Sumber Wawancara :

Agus, Sidoarjo, Tanggal 10 April 2014.

Anas Budi, Sidoarjo, 11 Desember 2013.

Astutik, Sidoarjo, 25 Juni 2013.